

ABSTRAK

Sebagai Negara Hukum yang menegakan supremasi dan keadilan berarti bahwa dalam segala urusan Negara dan masyarakat perlu adanya regulasi berupa peraturan perundang-undangan. Sebagai pembentuk, pelaksana dan pengawas regulasi tersebut Negara mempunyai elemen-elemen penting yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin sebagai Negara demokrasi, namun dengan tingkat literasi yang rendah berdasarkan data *World's Most Literate Nations* dan *Program for International Student Assessment (PISA)* menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat yang berdampak pada tingginya kriminalitas di Jawa Timur. Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK memberikan pernyataan tegas bahwa pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan sejak dini melalui IPTEK, akan tetapi implementasi yang kurang baik memberikan dampak yang berlawanan.

Dalam penelitian ini yang menggunakan metode penelitian empiris dengan jenis *Probability Sampling* didapatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Gubernur sebagai Kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan di Jawa Timur, dalam hal tersebut Gubernur mendistribusikan urusan-urusan tersebut kepada sekretariat, dinas, lembaga dan badan yang ada di Jawa Timur sesuai dengan Tugas dan Wewenangnya termasuk peningkatan kualitas pendidikan untuk mengurangi kriminalitas dimasyarakat, dengan demikian kesejahteraan umum dapat teratasi. Akan tetapi pendekatan tersebut perlu dorongan teknologi berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2019, sebab Masyarakat di Jawa Timur tergolong literasi rendah namun kecenderungan untuk menggunakan *smartphone* sangat tinggi. Melalui aplikasi "Hukum Kita" yang dibuat untuk memberikan pemahaman hukum dan layanan bantuan hukum kepada masyarakat melalui *platform* digital, masyarakat di Jawa Timur merasakan manfaat sekaligus mudah memahami hukum dengan cara yang berbeda. Hal tersebut lah yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan daerah dengan teknologi digital.

Kata Kunci : Lembaga Negara, Sistem Nasional IPTEK, Kriminalitas, Teknologi Digital

ABSTRACT

As a state of law that upholds supremacy and justice, it means that in all affairs of the state and society there need to be regulations in the form of laws and regulations. As the maker, implementer, and supervisor of these regulations, the State has important elements that have the duty and obligation to ensure the welfare of the people can be guaranteed as a democratic country, but with a low literacy level based on data from the World's Most Literate Nations and Program for International Student Assessment (PISA). causes low public knowledge which has an impact on high crime in East Java. The Republic of Indonesia through Law Number 11 of 2019 concerning the National System of Science and Technology provides a firm statement that development and community welfare can be carried out from an early age through science and technology, but poor implementation has the opposite effect.

In this study using empirical research methods with the Probability Sampling type, it was found that the Regional Government of East Java Province led by the Governor as the Regional Head and the representative of the central government in the region had an important role in implementing it in East Java, in this case, the Governor distributed these affairs to secretariats, offices, institutions, and agencies in East Java following their duties and authorities, including improving the quality of education to reduce crime in the community, thereby improving the general welfare. However, this approach needs technological encouragement based on Law Number 11 of 2019, because people in East Java are classified as having low literacy but the tendency to use smartphones is very high. Through the “Hukum Kita” application which was created to provide legal understanding and legal aid services to the public through a digital platform, people in East Java feel the benefits and at the same time easily understand the law differently. This is what the East Java Provincial Government needs to do to synergize regional policies with digital technology.

Keywords : *State Institutions, Nation System of science and technology, crime. Digital technology*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	21
2.1. Pengertian Lembaga Negara	21
2.2. Pengertian Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	26
2.3. Teori Organ dan Lembaga Negara.....	28
2.4. Teori Kewenangan	30
2.5. Teori Kepastian Hukum.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
3.1. Lembaga Hukum dalam Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Memberikan Edukasi dan Penanganan Cepat Penyelesaian Sengketa Hukum di kalangan Masyarakat Jawa Timur	37
3.1.1. Lembaga Negara dan Ilmu Pengetahuan Teknologi di Jawa Timur.....	42
3.1.2. Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum di Masyarakat Jawa Timur	53

3.2. Dampak Penggunaan <i>Platform</i> Digital dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Dikalangan Masyarakat di Kota dan Masyarakat di Desa se-Jawa Timur	63
3.2.1. Pengumpulan Database	69
3.2.2. Desain Produk dan Proses Pembuatan Aplikasi	70
3.2.3. Dampak Penggunaan <i>Platform</i> Bagi Masyarakat, Akademisi, dan Praktisi Hukum	79
BAB IV PENUTUP.....	83
4.1. Kesimpulan	83
4.2. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	866

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 1 Keasilian Penulisan.....	9
Tabel 2 Data Lembaga Subjek Penelitian.....	24
Tabel 3 Jumlah Responden se Jawa Timur.....	57
Grafik 1 Jumlah Provinsi Menurut Tingkat Aktivitas Literasi.....	39
Grafik 1.2 Indeks Alibaca Provinsi Menurut Peringkat dari tinggi ke rendah.....	40
Grafik 2 Daftar pekerjaan responden se Jawa Timur.....	58
Grafik 2.1 Tingkat permasalahan hukum di Jawa Timur.....	60
Grafik 2.2 Tingkat penyelesaian masalah hukum di Jawa Timur.....	60
Grafik 2.3 Penyebab.....	62
Grafik 3. Responden menggunakan Smartphone.....	66
Grafik 3.1 Responden menggunakan smarphone 24 jam.....	66
Grafik 3.2 Aktivitas di Smartphone.....	67